

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku-buku

- Abdul Aziz Hakim, 2015, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Abdul Hakim Garuda Nusantara, 1988, *Politik Hukum Indonesia*, Jakarta: YLBHI
- Abdul Kholiq Azhari dan Abdul Haris Suryo Negoro, 2021, *Kepemimpinan Kepala Daerah Pasca Pilkada Langsung dan Era Otonomi Daerah*, Malang: Intrans Publishing
- Abdurrahman, 1986, *Tebaran Pikiran tentang Studi Hukum dan Masyarakat*, Jakarta: Media Sarana Press
- Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- A.S.S. Tambunan, 2011, *Pemilu di Indonesia dan Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD*, Bandung: Bina Cipta
- , 2002, *Politik hukum Berdasarkan UUD 1945*, Jakarta: Puporis
- Aziz Setyagama, 2017, *Pembaruan Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung di Indonesia*, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing
- Bambang Poernomo, 1988, *Pola Dasar Teori dan Asas Umum Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty
- Bernard Arief Sidharta, 1999, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju
- Cakra Arbas, 2012, *Jalan Terjal Calon Independen pada Pemilukada di Provinsi Aceh*, Jakarta: Sofmedia
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2003, *Metode Penelitian*, Jakarta: Universitas Indonesia Pers
- Hans Kelsen, 2007, *Teori Umum Hukum dan Negara Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empiris*, Jakarta: Bee Media Indonesia
- Harmailli Ibrahim, 1978, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara UI

- Hendra Nurtjahjo, 2006, *Filsafat Demokrasi*, Jakarta: Bumi Aksara
- Ijiswa, F, 1999, *Pengantar Ilmu Politik*, Bandung: Putra A. Bardin
- Imam Syaukani dan A.Ahsin Thohari, 2004, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Konstitusi Pers
- Kholid O. Santoso (Ed.), 2009, *Mencari Demokrasi Gagasan dan Pemikiran*, Bandung: Sega Arsy
- Leo Agustina, 2009, *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Maria Farida Indrati, 2011, *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Kanisius
- Miriam Budiardjo, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Mahfud MD, 1999, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media
- , 2009, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1978, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI
- Muhammad Syuib, 2019, *Dinamika Politik Hukum Pilkada bagi PNS*, Banda Aceh: CV. Bravo Darussalam
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Munir Fuady, 2013, *Teori-Teori Besar (grand theory) dalam Hukum*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Nur Basuki Winanrno, 2008, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama
- Padmo Wahjono, 1986, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Parulian Donald, 2009, *Menggugat Pemilu*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Rusli Karim, 2010, *Pemilu Demokratis Kompetitif*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya

Satjipto Raharjo, 2009, *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman Di Indonesia*, Yogyakarta: Genta

-----, 1991, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti

Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, 1993, *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti

Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press

Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta

Tim Penyusun, 2020, *Revisi Buku Pedoman Penulisan Tesis*, Program Studi Magister Hukum, Lhokseumawe: Universitas Malikussaleh

Titik Triwulan, 2010, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Prenada Media Groep

Yudi Latif, 2011, *Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

II. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang

III. Jurnal dan Tesis

Ahmad Zaini, Dkk, 2021, *Legalitas Perppu Pilkada Serentak di Masa Pandemi Covid-*

19, Volume 12, Nomor 1

- Alfatih, S, 2015, *Reformulasi parliamentary threshold yang berkeadilan dalam pemilu legislatif di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
- Andrian Marsella, 2021, *Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 di masa Pandemic Covid-19 Perspektif PKPU No. 6 Tahun 2020*, Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin
- Dadan Ramdani, 2022, *Problematika Penunjukan Penjabat Kepala Daerah pada Masa Transisi Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024*, Tesis, Program Studi Magister Hukum, Universitas Islam Indonesia
- Dessy Agustina Harahap, 2017, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksana Pengawasan Pilkada Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Dalam Mewujudkan Demokrasi Di Daerah*, Jurnal Mercatoria, Vol. 10, No. 1
- Jamil dan Dian Ferricha, 2020, *Penundaan Pilkada sebagai Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease*, Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum
- Jurnal Crepido, 2020, *Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 pada Masa Pandemi Darurat Covid-19 di Indonesia*, Volume 02, Nomor 02
- Khairul Fahmi, 2021, *Prinsip Kedaulatan Rakyat dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif*, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 3
- Kristian, 2020, *Aspek Hukum Tata Negara pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak disaat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6, Nomor 2
- Maulida Rita Widyana dan Addien Fikriansyah, 2021, *Analisis SOAR: Dampak Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024*, Volume 4, Nomor 2
- Mukhlis, *Politik Hukum Penundaan Pelaksanaan Pilkada Aceh Tahun 2022 Menjadi 2024*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe
- Ni'matul Huda, 2021, *Problematika Penundaan Pemilihan Kepala Daerah dalam Pemilihana Umum Serentak Nasional 2024*, Volume 7, Nomor 2
- Nita Widyastuthie, 2012, *Pelaksanaan Pemilukada Aceh menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh*, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia

- R Muhammad Miharadi, 2002, *Dinamika Kebijakan Hukum Dalam Transisi Demokrasi*, Jurnal Keadilan, Vol. 2, Nomor 6
- Refly Harun, 2005, *Pilkada Langsung di Aceh, di Antara Sengketa Tiga Aturan*, Jurnal Lex Jurnalical, Vol. 3, No. 1
- S. Abdullah, *Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Persimpangan Jalan*, Fakultas Hukum Universitas Batanghari, Jambi
- Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Solikhul Hadi, 2015, *Pengaruh Konfigurasi Politik Pemerintah terhadap Produk Hukum ADDIN*, Vol. 9, No. 2
- T. Hendra Saputra, 2018, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung Menurut Undang-Undang Pasca Reformasi dan Pemikiran Al Mawardi*, Banda Aceh: UIN Ar Raniry
- Titis Anindyajati, dkk, 2021, *Implementasi dan Akibat Hukum Penerapan Asas Lex Spesialis Derogat Legi Generalis terhadap Keistimewaan Aceh*, Jurnal Konstitusi, Volume 18, Nomor 3
- Wahyu Nugroho, 2016, *Politik Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 3
- Zahlul Pasha Karim, 2019, *Sengkarut Lembaga Pemilu Di Antara Tiga Aturan: Studi Terhadap KIP Aceh*, Electoral Reseach

IV. Sumber Lain

- Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19

